

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
SUB BIDANG PRASARANA  
PEMERINTAHAN  
TA 2016**

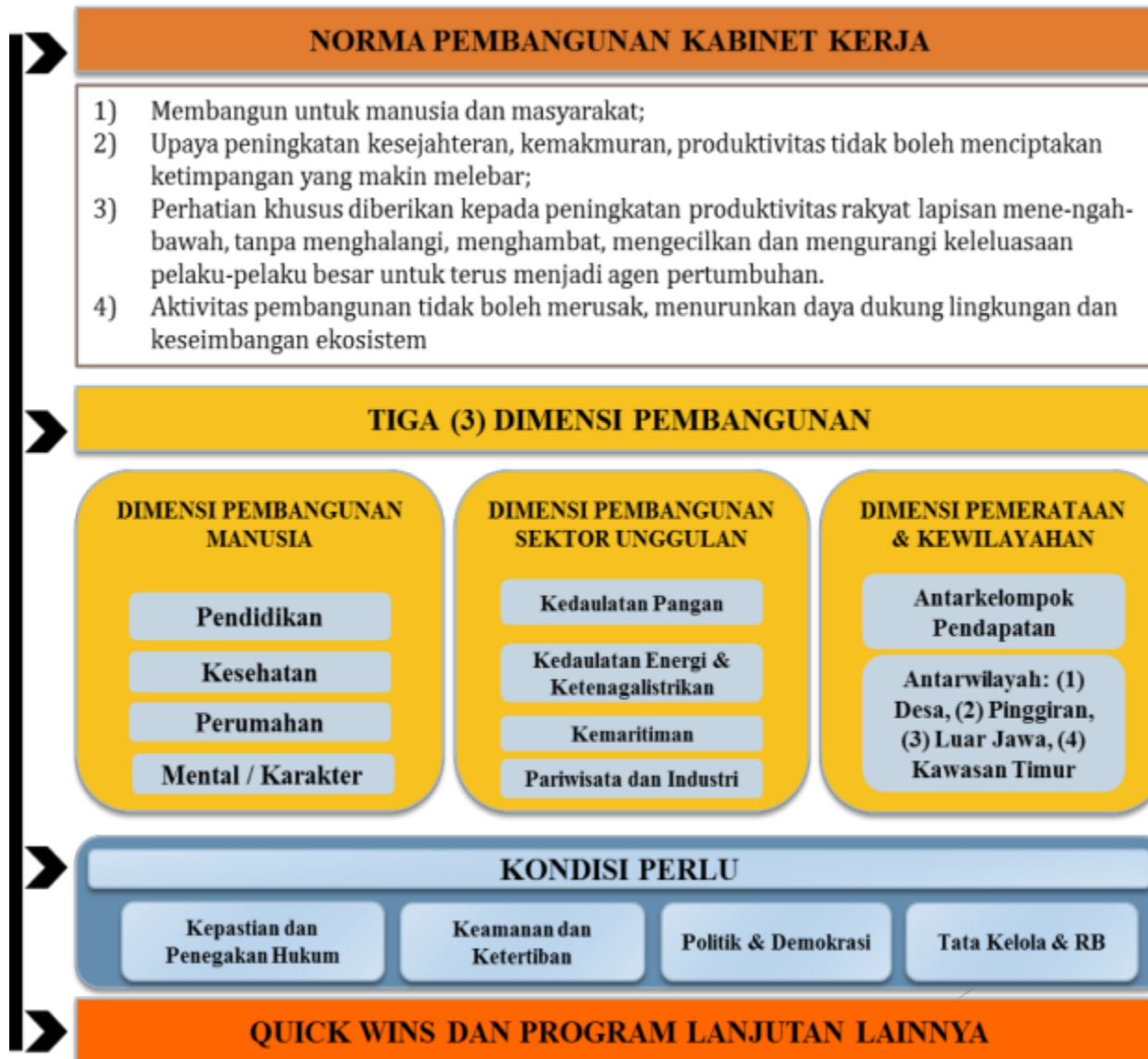


**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

# OUTLINE

- ▶ PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAK
- ▶ DASAR HUKUM DAK PRASPEM
- ▶ DAK PRASPEM DAN FOKUS RPJMN
- ▶ ARAH KEBIJAKAN
- ▶ TUJUAN
- ▶ SASARAN
- ▶ RUANG LINGKUP
- ▶ INDIKATOR KINERJA
- ▶ GAMBARAN PENGELOLAAN DAK PRASPEM

# PEMBANGUNAN NASIONAL & DAK



# BIDANG DAK

## BIDANG DAK 2017

NO.	DIMENSI PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	BIDANG DAK
1	Dimensi pembangunan manusia	Pendidikan	Pendidikan
2		Kesehatan	Kesehatan dan Keluarga Berencana
3		Perumahan	Perumahan, Permukiman, Air minum, dan Sanitasi
4	Dimensi sektor unggulan	Kedaulatan pangan	Kedaulatan Pangan
5			Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6		Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan	Energi Perdesaan
7		Kemaritiman	Kelautan dan Perikanan
8	Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan	Antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	Sarana Prasarana Pemerintahan
9			Transportasi
10			Sarana Perdagangan dan Industri
11	Pengalihan dana quasi Dekon-TP		DAK Bid. Pendukung

# DASAR HUKUM DAK PRASPEM

## Dasar Hukum, Nawacita dan Prioritas

### DAK Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

No.	Dasar Hukum	RPJMN 2015-2019	
		Nawacita	Prioritas
1	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<b>Nawacita 2:</b> Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	1
2	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		a. Mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien;
3	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah		b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	<b>Nawacita 3:</b> Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	2
5	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019		Pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
6	Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri		
7	Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 (Perpres No..../2016)		

# ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah; dengan memprioritaskan daerah otonom baru (DOB), non-DOB, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum ada dan layak atau memadai.

# TUJUAN

Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan publik di daerah dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah daerah.

# SASARAN DAK PRASPEM

## TAHUN 2017

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah yang belum memadai sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

## JANGKA MENENGAH

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pencapaian sasaran nasional, serta untuk menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru (DOB), non-DOB, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan (RKP 2016).

# RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pada DAK sub-Bidang Praspem Daerah T.A. 2017 adalah:

- Pembangunan/Perluasan gedung kantor Gubernur, Bupati/Walikota;
- Pembangunan/Perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota;
- Pembangunan/Perluasan SKPD Provinsi/Kab/Kota (termasuk kantor kecamatan);
- Dikecualikan untuk pembangunan kantor Satpol PP dan Damkar (*Mempunyai spesifikasi teknis tersendiri*)

Pelaksanaan DAK di daerah menganut prinsip skala prioritas:

1. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
2. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar;
3. Pembangunan praspem yang terkait urusan pemerintahan pilihan

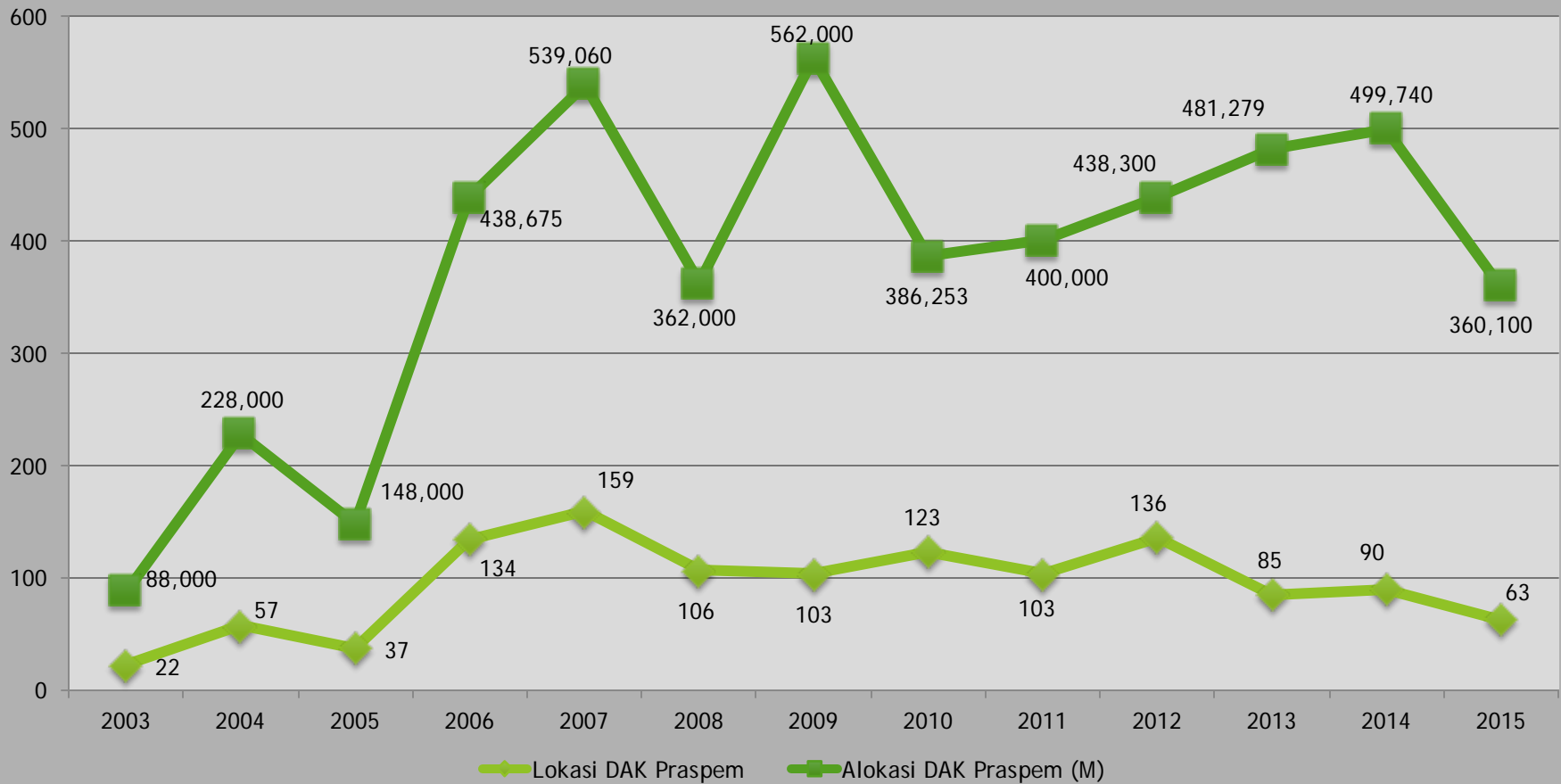


# INDIKATOR KINERJA

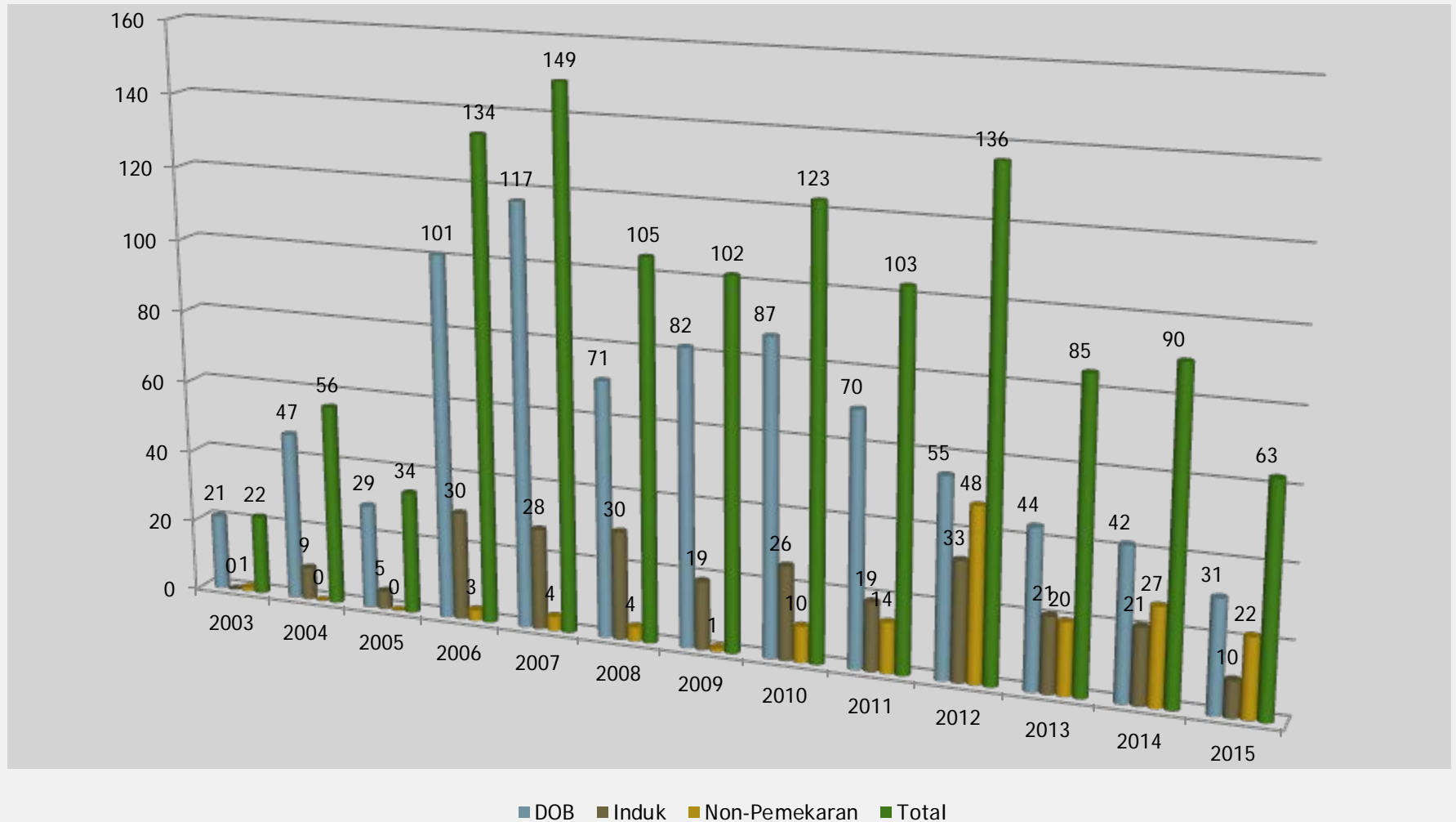
No.	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja TA 2017
a.	Keluaran <i>/Output</i>	Terlaksananya Pembangunan/Perluasan gedung kantor : a. Gubernur/Bupati/Walikota; b. DPRD Provinsi/Kab/Kota; c. SKPD Provinsi/Kab/Kota;	Realisasi fisik sebesar 100 % di daerah penerima DAK sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah TA. 2017
b.	Dampak/ <i>Outcome</i>	Menguatnya tata kelola pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah: daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pesisir dan kepulauan, dan non-DOB yang prasarana pemerintahannya belum memadai.	Peningkatan kualitas pelayanan publik (KPP) dan peningkatan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

# ALOKASI DAK PRASPEM 2003-2015

Lokasi dan Alokasi DAK Praspem 2003-2015



# SEBARAN LOKASI DAK PRASPEM 2003-2015




# PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DAK SUB BIDANG PRASPEM 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun 2012 : 136 Kab/Kota  
Rp : 444,504 M

Tahun 2013 : 85 Kab/Kota  
Rp : 481,279 M

Tahun 2014 : 87 Kab/Kota dan 3 Provinsi  
Rp : 499,740 M

Tahun 2015 : 63 Kab/Kota, dan 1 Provinsi  
Rp : 360,100 M



Tahun 2016 : 73 Kab/Kota, dan 1 Provinsi  
Rp : 176,410 M

# LOKASI PENERIMA DAK PRASPEM TAHUN 2016

No	Nama Daerah
1	<b>Provinsi Aceh</b>
1	Kab. Aceh Selatan
2	Kab. Aceh Tengah
3	Kab. Gayo Lues
4	Kab. Pidie Jaya
5	Kota Subulussalam
2	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>
6	Kab. Nias
7	Kab. Tapanuli Tengah
8	Kab. Tapanuli utara
9	Kab. Pak-pak Barat
10	Kab. Padang Lawas
3	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>
11	Kab. Pesisir Selatan
4	<b>Provinsi Riau</b>
12	Kab. Kepulauan Meranti
5	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>
13	Kota Prabumulih
14	Kota Pagar Alam
15	Kab. Banyuasin
16	Kab. Panukal Abab Lematang Ilir
17	Kab. Musi Rawas Utara

No	Nama Daerah
6	<b>Provinsi Bengkulu</b>
7	<b>Provinsi Lampung</b>
18	Kab. Lampung Selatan
19	Kab. Pringsewu
20	Kab. Pesisir Barat
8	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>
9	<b>Provinsi Jawa Barat</b>
21	Kab. Kuningan
22	Kab. Pangandaran
10	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>
23	Kab. Karanganyar
24	Kab. Sragen
11	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>
12	<b>Provinsi Jawa Timur</b>
25	Kab. Sampang
26	Kab. Situbondo
13	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>
27	Kab. Sintang

# LANJUTAN....

No	Nama Daerah
14	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>
28	Kab. Kotawaringin Timur
15	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>
16	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>
29	Kab. Mahakam Ulu
17	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>
30	Kab. Minahasa
31	Kab. Minahasa Utara
18	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>
32	Kab. Banggai Kepulauan
33	Kab. Buol
34	Kota Palu
35	Kab. Sigi
36	Kab. Banggai Laut
37	Kab. Morowali Utara
19	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>
38	Kab. Jeneponto
39	Kota Palopo
40	Kab. Pinrang
41	Kab. Sinjai
42	Kab. Takalar
43	Kab. Toraja Utara

No	Nama Daerah
20	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>
44	Kab. Kolaka Utara
45	Kab. Konawe Kepulauan
46	Kab. Kolaka Timur
47	Kab. Muna Barat
48	Kab. Buton Tengah
49	Kab. Buton Selatan
21	<b>Provinsi Bali</b>
50	Kab. Bangi
22	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>
51	Kab. Dompu
52	Kab. Lombok Tengah
23	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>
53	Kab. Alor
54	Kab. Belu
55	Kab. Ende
56	Kab. Malaka
24	<b>Provinsi Maluku</b>
57	Kab. Maluku Tenggara
58	Kab. Maluku Barat Daya
25	<b>Provinsi Papua</b>
59	Kab. Kepulauan Yapen
60	Kab. Tolikara
61	Kab. Lanny Jaya
62	Kab. Dogiyai

# Lanjutan....

No	Nama Daerah
26	<b>Provinsi Maluku Utara</b>
63	Kab. Halmahera Barat
64	Kab. Pulau Taliabu
27	<b>Provinsi Banten</b>
65	Kab. Lebak
66	Kab. Pandeglang
28	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>
29	<b>Provinsi Gorontalo</b>
67	Kab. Pohuwato
68	Kab. Kepulauan Anambas
30	<b>Provinsi Papua Barat</b>
69	Kab. Maybrat
70	Kab. Manokwari Selatan
71	Kab. Pegunungan Arfak
31	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>
72	Kab. Mamuju Tengah
32	<b>Provinsi Kalimantan Utara</b>
73	Kab. Nunukan





# FORM : DATA TEKNIS

LAMPIRAN IV : PENYAMPAIAN KRITERIA TEKNIS SERTA MENU KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAI  
DAN DAK PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR :  
TANGGAL :

**DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN  
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA  
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**1. BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. SUB BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH**

NO.	DATA TEKNIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Indikator Status Prasarana Pemerintahan			
	a) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus sewa	unit		
	b) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus gabung	unit		
	c) Prasarana pemerintahan daerah yang berstatus milik sendiri	unit		
	d) Total jumlah prasarana pemerintahan yang ada.	unit		
2	Indikator Kondisi Prasarana Pemerintahan Daerah			
	a) Gedung kantor Bupati/Walikota, DPRD, dan SKPD Kab/Kota yang kondisinya rusak berat;	unit		
	b) Gedung kantor Bupati/Walikota, DPRD, dan SKPD Kab/Kota yang kondisinya rusak sedang;	unit		
	c) Jumlah keseluruhan prasarana pemerintahan berstatus milik sendiri	unit		

**FORMAT  
PELAPORAN DAK  
(SESUAI DENGAN PERMENDAGRI  
NO 85 TAHUN 2015)**



**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN .... / ....  
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :  
Bidang :

Form I

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat <sup>(*)</sup>	Jumlah			Swakelola (Rp- juta)	Kontrak (Rp- juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
Total																

6

Sebutkan jumlah dana DAK yang digunakan oleh SKPD untuk membiayai jenis kegiatan pada masing-masing bidang DAK

7

Tahun 2017, Tidak diperlukan lagi

8

Jumlah antara jumlah DAK yang diterima (6) dan dana pendamping (7)

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN ... / ...  
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :  
Bidang :

Form I

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat <sup>(*)</sup>	Jumlah			Swakelola (Rp- juta)	Kontrak (Rp- juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
Total																

9

Sebutkan jumlah dana DAK yang dilaksanakan secara swakelola (tanpa tender). Pada dasarnya, metode pelaksanaan kegiatan secara swakelola merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat

10

Sebutkan jumlah dana DAK yang dilaksanakan melalui mekanisme pihak ketiga/kontraktor

12

Sebutkan persentase penyerapan keuangan berdasarkan total biaya (8) yang telah diserap pada kurun waktu tertentu (triwulan)

11

Sebutkan persentase fisik atas status pelaksanaan kegiatan terkini berdasarkan presentase volume (4) fisik yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu (triwulan)

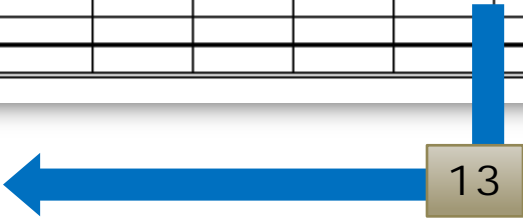
**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN .... / ....  
(Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

Provinsi :  
Kota/Kabupaten :  
SKPD :  
Bidang :

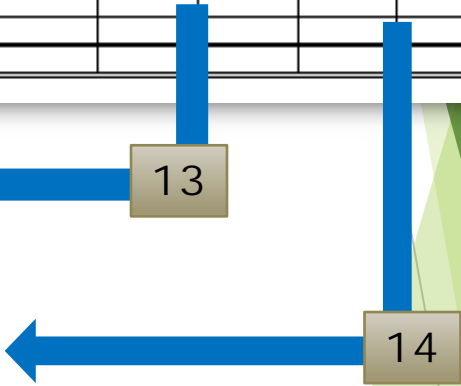
Form I

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat <sup>(*)</sup>	Jumlah			Swakelola (Rp- juta)	Kontrak (Rp- juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
Total																

Klarifikasi kesesuaian antara kegiatan DAK dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Kesesuaian Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan dan ruang lingkup di masing-masing bidang DAK yang tercantum dalam petunjuk teknis



- Kodefikasi Masalah :**
- | Kode | Masalah  |
|------|--|
| 1    | Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)     |
| 2    | Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis                      |
| 3    | Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD      |
| 4    | Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD                             |
| 5    | Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan      |
| 6    | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak |
| 7    | Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola        |
| 8    | Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D                      |
| 9    | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak        |
| 10   | Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola      |

Mohon diisi sesuai dengan permasalahan yang timbul atas pelaksanaan kegiatan



**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN**  
**CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN**  
**DANA ALOKASI KHUSUS**  
**TAHUN ANGGARAN .... / ....**  
 (Diisi oleh Sekda Kabupaten/Kota dan Provinsi)

Form II

No.	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN</b>		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN</b>		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		



**Keterangan**

- Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
- Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
- Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
- Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
- Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
- Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola
- Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
- Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola
- Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
- Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

Critical point evaluasi. Daerah jarang mengisi padahal format ini bertujuan untuk **mencapture** proses perencanaan dan penganggaran DAK agar tercipta suatu sinergi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah



**SEKIAN**  
**Terima Kasih ....**